

## **ANALISIS PERAN SISTEM KEUANGAN DESA UNTUK MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI AKURASI DAN AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH**

**Gede Sanjaya Adi Putra<sup>1</sup>, I Gusti Ngurah Sanjaya<sup>2</sup>, Cokorda Krisna Yudha<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia

e-mail: [sanjaya.adiputra29@gmail.com](mailto:sanjaya.adiputra29@gmail.com)

Diterima: 11-09-2024 Disetujui: 16-12-2024

### **Abstrak**

Penelitian ini mengeksplorasi peran penting akurasi dan akuntabilitas laporan keuangan dan penerapan system keuangan desa dalam pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia melalui penerapan *good governance dalam* pengelolaan dana desa. Fokus penelitian terletak pada tantangan penerapan *good governance* di tingkat desa, yang penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran system keuangan desa dalam meningkatkan tata kelola yang baik melalui peningkatan akurasi dan akuntabilitas laporan keuangan desa. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan 172 responden dari desa di wilayah Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun system keuangan desa tidak secara langsung mempengaruhi penerapan *good governance*, sistem ini meningkatkan kualitas laporan keuangan desa, yang berperan sebagai variabel mediasi dalam mendukung GCG. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi, bantuan teknis dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta komitmen desa terhadap transparansi pelaporan keuangan untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat penerapan *good governance*.

**Kata kunci:** GCG; Siskeudes; Kualitas Laporan Keuangan

### **Abstract**

*This research explores the important role of accuracy and accountability of financial reports and the implementation of village financial systems in regional development and community welfare in Indonesia through the implementation of good governance in the management of village funds. The focus of the research lies on the challenges of implementing good governance at the village level, which is essential to ensure transparency, accountability and efficiency in village financial management. The purpose of this study is to analyse the role of the village financial system in improving good governance through increasing the accuracy and accountability of village financial reports. The study used qualitative and quantitative methods with a descriptive approach, involving 172 respondents from villages in the Denpasar area. The results showed that although the village financial system does not directly influence the implementation of good governance, it improves the quality of village financial reports, which acts as a mediating variable in supporting GCG. The study recommends increasing the capacity of human resources in accounting, technical assistance from the Financial and Development Supervisory Agency, and village commitment to financial reporting transparency to build public trust and strengthen the implementation of good governance.*

**Keywords:** GCG; Siskeudes; Village Financial Quality

## Pendahuluan

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, perangkat desa menjadi ujung tombak dalam mengelola sumber daya dan melaksanakan program-program pembangunan. Menurut Fitrianti, & Sari, (2024) Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di tingkat desa sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa. GCG merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan organisasi agar berjalan secara transparan, bertanggung jawab, dan akuntabel. Dengan menerapkan GCG, diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat (Agustin, & Wahyuni, 2020 ; Indrianti, 2020).

Untuk mencapai good governance secara optimal, terdapat beberapa faktor dan persyaratan yang mempengaruhi implementasinya, antara lain pelaksana manusia, partisipasi masyarakat, keuangan daerah, peralatan, serta organisasi dan manajemen (Maharani, & Akbar, 2020). Penerapan otonomi desa memberikan kekuatan kepada pemerintah desa untuk mengelola dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri, meskipun hal ini juga menambah beban tanggung jawab dan kewajiban desa. Namun demikian, pelaksanaan pemerintahan tersebut tetap harus dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam hal pelaporan keuangan desa. Sistem pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dikelola oleh pemerintah desa mencakup proses penghimpunan dan pertanggungjawaban (Norliani, 2020).

Pelaporan keuangan merupakan informasi keuangan yang dihasilkan oleh suatu organisasi selama periode akuntansi dengan tujuan menggambarkan kinerja perusahaan. Pelaporan ini mencakup laporan utama seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan perubahan posisi keuangan. Sulina (2020) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat bergantung pada sejauh mana informasi yang disajikan dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pengguna dalam pengambilan keputusan, bebas dari kesalahan material, dan dapat diandalkan. Laporan keuangan yang berkualitas juga harus memungkinkan perbandingan dengan periode sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan dinilai berkualitas jika informasi yang disajikan mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh pengguna. Setiap pemerintah desa diwajibkan untuk menyelenggarakan pelaporan keuangan secara transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mewajibkan publikasi laporan keuangan desa dalam bentuk baliho. Selain itu, penyusunan laporan keuangan daerah harus mengikuti peraturan perundang-undangan dan didukung oleh sistem teknologi informasi yang memadai. Hayati (2022) menegaskan bahwa peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan kompleks memerlukan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Fenomena penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di tingkat desa menunjukkan berbagai dinamika yang mencerminkan tantangan dan peluang dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik. Prinsip utama GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, sering kali belum sepenuhnya terimplementasi secara konsisten di pemerintahan desa. Hal ini dapat terlihat dari masih minimnya pelaporan keuangan yang terbuka, rendahnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran, serta keterbatasan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendorong penerapan GCG, seperti melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berbagai peraturan teknis lainnya, banyak desa masih menghadapi kendala struktural dan sumber daya. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat perangkat desa menjadi salah satu hambatan utama. Beberapa perangkat desa belum memiliki

kompetensi yang memadai dalam mengelola administrasi dan keuangan desa secara profesional, yang sering kali berujung pada laporan keuangan yang tidak sesuai standar atau sulit dipahami oleh masyarakat.

Selain itu kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa yang belum maksimal menjadi salah satu penghambat penerapan Good Government. Keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti akses internet yang tidak merata serta peralatan yang kurang memadai, menjadi penghambat utama bagi pemerintah desa dalam memaksimalkan penggunaan sistem pelaporan keuangan berbasis computer. Di banyak desa, pelaporan keuangan masih dilakukan secara manual, yang sering kali tidak hanya memperlambat proses, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan. Akibatnya, akurasi laporan keuangan sering kali diragukan serta akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi dipertanyakan (Norliani, 2020). Untuk mengatasi kendala tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2015 mulai merancang aplikasi SISKEUDES, dengan tujuan memberikan solusi teknis dan praktis bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan mereka sesuai prinsip Good Governance.

SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) adalah sebuah aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa secara efektif. Dalam perspektif teori Good Governance, SISKEUDES bertindak sebagai mekanisme yang membantu perangkat desa untuk menjalankan tugas keuangan sesuai standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Sistem ini mengintegrasikan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang semuanya berjalan dalam satu platform teknologi yang mudah diakses. Dengan demikian, SISKEUDES tidak hanya mempercepat proses administrasi keuangan, tetapi juga meningkatkan akurasi data, mengurangi kesalahan manusia, dan memberikan alat untuk memantau aliran dana secara real-time. Jika kita melihat dari perspektif **teori institusional**, penerapan SISKEUDES mendukung penguatan regulasi dan legitimasi tata kelola desa, karena sistem ini mendorong desa untuk mematuhi kerangka hukum dan peraturan yang lebih ketat. Dengan kata lain, SISKEUDES menjadi alat yang tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan dasar teori-teori ini, SISKEUDES dapat dianggap sebagai inovasi teknologi yang dirancang untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Dari dua perspektif di atas didapat bahwa tujuan utama dibuatkan Siskeudes adalah untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan yang lebih komprehensif, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban seharusnya pemerintah desa dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pihak-pihak terkait.

SISKEUDES mendukung transparansi dengan menyediakan laporan keuangan otomatis yang akurat dan berbasis data, sehingga informasi terkait penggunaan anggaran dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan pihak pengawas seperti BPKP atau Inspektorat. Hal ini membantu menciptakan keterbukaan informasi yang esensial dalam mencegah praktik korupsi dan penyimpangan anggaran. Selain itu, SISKEUDES juga meningkatkan akuntabilitas perangkat desa melalui pencatatan transaksi yang rinci dan terintegrasi dengan sistem pelaporan keuangan berbasis regulasi. Setiap langkah pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, terdokumentasi secara sistematis sehingga memudahkan proses audit dan pertanggungjawaban. Dari sisi efisiensi, penggunaan SISKEUDES mengurangi beban administrasi manual yang rentan terhadap kesalahan, sekaligus memastikan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan pedoman yang berlaku. Dengan mendukung penerapan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, SISKEUDES menjadi instrumen kunci dalam mewujudkan prinsip-prinsip GCG di tingkat desa.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak desa belum mampu mengoptimalkan teknologi ini. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi menjadi salah satu kendala signifikan (Juardi, 2021). Banyak perangkat desa belum mendapatkan pelatihan yang memadai tentang cara menggunakan SISKEUDES secara efektif. Selain itu, kesadaran akan pentingnya teknologi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan juga masih rendah. Akibatnya, tujuan awal peluncuran SISKEUDES, yaitu untuk menciptakan pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, belum tercapai secara merata. Ini menciptakan celah antara harapan dan kenyataan dalam pengelolaan keuangan desa, yang seharusnya lebih efektif dan efisien. Fenomena ini menciptakan kesenjangan antara harapan pemerintah terhadap standar pelaporan keuangan yang sesuai aturan dan kenyataan di lapangan, di mana pelaksanaan masih belum optimal. Pada saat yang sama, tantangan ini mengindikasikan perlunya upaya peningkatan kapasitas, baik dalam hal infrastruktur teknologi maupun kompetensi sumber daya manusia di desa, agar SISKEUDES dapat dioptimalkan dan kualitas pelaporan keuangan desa bisa memenuhi standar yang diharapkan. Jika tidak, potensi risiko penyelewengan dana desa dan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa akan terus menjadi masalah yang menghambat pencapaian *good governance* di tingkat pemerintahan desa (Kurniawan, 2021). Desa yang mampu mengelola keuangan dengan baik akan lebih mudah untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Hal ini terlihat dari bagaimana Siskeudes memungkinkan transparansi dalam setiap transaksi, sehingga masyarakat bisa mengetahui dengan jelas bagaimana dana desa digunakan (Runtunuwu, Tamboto, & Kambey, 2021). Dengan demikian, implementasi Siskeudes bukan hanya soal teknologi pengelolaan keuangan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang terletak pada fokus analisis peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam mendukung penerapan *good governance* melalui peningkatan akurasi dan akuntabilitas pelaporan keuangan desa. Sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Kindangen, Saerang, & Budiarmo, (2022) mengenai pentingnya *Good Corporate Governance* (GCG) dan pelaporan keuangan desa telah dilakukan, namun penelitian-penelitian tersebut cenderung membahas konsep GCG secara umum tanpa mengeksplorasi secara spesifik bagaimana SISKEUDES, sebagai alat utama pengelolaan keuangan desa, berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan desa. Kebaruan penelitian ini muncul dari sudut pandang yang berfokus pada analisis mendalam tentang pengaruh teknologi informasi, terutama aplikasi SISKEUDES, terhadap praktik pelaporan keuangan yang lebih akurat dan akuntabel. Aplikasi SISKEUDES telah dirancang untuk mempermudah proses pengelolaan keuangan desa, namun implementasinya masih kurang optimal di berbagai desa karena faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya kompetensi sumber daya manusia (Susano, & Rachmawati, 2024). Penelitian ini mengisi celah dalam literatur dengan mengevaluasi secara empiris sejauh mana SISKEUDES dapat berperan dalam memperbaiki praktik tata kelola keuangan desa, yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian *good governance* yang lebih baik. Penelitian ini juga menyoroti aspek pelaporan keuangan desa, yang sering kali dianggap kurang akurat dan akuntabel, serta bagaimana SISKEUDES dapat membantu memperbaiki kekurangan tersebut melalui sistem digital yang lebih efisien dan transparan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang relevan dalam memahami peran teknologi dalam memperkuat tata kelola keuangan desa dan mendukung implementasi GCG di tingkat lokal.

Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pandangan baru mengenai bagaimana teknologi informasi seperti SISKEUDES dapat diintegrasikan secara lebih baik dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencapai tata kelola yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dan pemangku

kepentingan lainnya tentang pentingnya pemanfaatan SISKEUDES yang optimal untuk mendukung pelaporan keuangan yang lebih akurat dan akuntabel, yang pada akhirnya akan memperkuat pelaksanaan *good governance* di desa.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berperan penting dalam mendukung terciptanya Good Corporate Governance (GCG) pada pemerintahan desa. Dengan fitur-fitur yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa, Siskeudes menjadi alat yang memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik. Implementasi Siskeudes mendorong pemerintah desa untuk mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti keterbukaan informasi, tanggung jawab, dan akuntabilitas kepada masyarakat. Selain itu, Siskeudes mampu meminimalisir potensi kesalahan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan melalui pencatatan yang sistematis dan terintegrasi. Dengan demikian, penerapan Siskeudes diperkirakan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas GCG pada pemerintahan desa, sehingga mendukung pengelolaan yang lebih profesional dan berintegritas. Studi-studi sebelumnya seperti Hardiningsih et al 2019, Hayati, (2021), Maharani, & Akbar, (2020) dan Juardi et al (2018) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi, seperti Siskeudes, memiliki hubungan positif dengan peningkatan kualitas tata kelola karena mampu memperbaiki proses administrasi keuangan secara signifikan. Oleh karena itu, diduga bahwa implementasi Siskeudes secara efektif akan memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan penerapan Good Corporate Governance di tingkat pemerintahan desa. Berdasarkan argumen diatas hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.  
H1: implementasi Siskeudes berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Corporate Governance di pemerintah desa.

Penggunaan Siskeudes secara efektif dapat meminimalisir kesalahan dalam pencatatan transaksi, meningkatkan akurasi data, dan mempercepat proses penyusunan laporan. Selain itu, fitur kontrol internal dalam Siskeudes membantu memastikan bahwa laporan keuangan memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan bebas dari kecurangan atau manipulasi data. Dengan penerapan Siskeudes, pemerintah desa memiliki alat untuk menyusun laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipercaya, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Penelitian sebelumnya seperti Kuraesin, & Yadiati, (2021), Haryanto, & Suryana, (2020), serta Dewi, & Yadiati, (2021) menunjukkan bahwa adopsi teknologi informasi dalam sistem pengelolaan keuangan memiliki hubungan positif dengan peningkatan kualitas laporan keuangan, khususnya dalam hal akurasi, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut.

H2: Siskeudes berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

Salah satu cara Siskeudes memengaruhi GCG adalah melalui peningkatan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan informasi yang andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, kualitas laporan keuangan menjadi faktor mediasi yang menghubungkan penggunaan Siskeudes dengan penerapan GCG. Penggunaan Siskeudes memungkinkan pencatatan keuangan yang lebih akurat, pengolahan data yang sistematis, dan penyajian laporan yang sesuai dengan standar akuntansi. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi persyaratan regulasi tetapi juga mencerminkan pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab. Kualitas laporan keuangan ini kemudian menjadi instrumen penting dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, yang merupakan elemen utama dalam tata kelola yang baik. Penelitian sebelumnya seperti

Hastutiningtyas, (2023) dan Maryam et al., (2021) menunjukkan bahwa teknologi informasi dalam sistem keuangan memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kualitas laporan keuangan, yang pada gilirannya berdampak pada pelaksanaan GCG. Oleh karena itu, diduga bahwa implementasi Siskeudes tidak hanya berpengaruh langsung terhadap GCG tetapi juga secara tidak langsung melalui peningkatan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan argumen ini, hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H3: Siskeudes berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Corporate Governance dengan dimediasi oleh kualitas laporan keuangan.

### Metode

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan eksplanatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peran Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam meningkatkan Good Governance melalui peningkatan akurasi dan akuntabilitas pelaporan keuangan di pemerintahan desa. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui survei menggunakan kuesioner yang disebarluaskan kepada responden yang berwenang di desa pada wilayah kota Denpasar. Kota Denpasar, sebagai ibu kota Provinsi Bali, terdiri dari sejumlah kelurahan dan desa yang tersebar di empat kecamatan, yaitu Denpasar Utara, Denpasar Timur, Denpasar Barat, dan Denpasar Selatan. Masing-masing kecamatan ini memiliki karakteristik administratif dan demografis yang unik. Di Kecamatan Denpasar Utara, terdapat kelurahan dan desa seperti Kelurahan Ubung, Kelurahan Tonja, Desa Pemecutan Kaja, dan Desa Peguyangan. Sementara itu, Kecamatan Denpasar Timur mencakup wilayah seperti Kelurahan Sumerta, Kelurahan Kesiman, Desa Kesiman Kertalangu, dan Desa Sumerta Kaja. Kecamatan Denpasar Barat, yang berkembang pesat, memiliki kelurahan dan desa di antaranya Kelurahan Dauh Puri, Kelurahan Pemecutan, Desa Tegal Harum, serta Desa Dauh Puri Kauh. Sedangkan Kecamatan Denpasar Selatan, yang terkenal dengan kawasan wisata, mencakup Kelurahan Sanur, Kelurahan Sesetan, Desa Sanur Kaja, dan Desa Sidakarya.

Responden dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, di mana dipilih secara khusus pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa meliputi Kepala Desa sebagai pemegang otoritas pengelolaan keuangan desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) Penganggaran/Bendahara, serta Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Masyarakat atau Bidang Pelayanan Publik (BPP). Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, terdapat 4 sampel dari masing-masing desa, karena mereka lebih memahami seluruh kegiatan desa dan memiliki pengetahuan terkait akuntabilitas. Selain itu, mereka umumnya terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian ini, responden yang terlibat adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kasi Pelayanan Masyarakat/BPN dari masing-masing desa, sehingga total responden berjumlah 172 orang.

### Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan teknik analisis PLS yang menggunakan Program SmartPLS versi-3. Analisis deskripsi terhadap variabel penelitian dilakukan dengan tujuan menginterpretasikan makna masing-masing variabel penelitian. Pengukuran jawaban menggunakan skala likert, dengan karakter jawaban satu sampai lima. Angka satu berarti sangat tidak setuju dan semakin mendekati angka lima berarti semakin setuju, hingga sangat setuju. Terdapat empat variabel yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu Kompetensi Pemanfaatan Siskeudes (X), Kualitas Laporan Keuangan (M), Good Government (Y). Variabel pertama yaitu Pemanfaatan Siskeudes diukur dengan empat dimensi dengan pengukuran Skala Likert. Variabel

Pemanfaatan Siskeudes direfleksikan oleh empat (4) dimensi, yaitu Kemudahan dalam Penggunaan, Resiko, Fitur Layanan, dan dimensi Pemanfaatan perangkat lunak aplikasi. Variabel ini memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman aparatur desa dalam menggunakan Siskeudes, tingkat kemudahan operasional sistem, serta tingkat kepuasan pengguna terhadap kinerja sistem. Variabel kedua yaitu kualitas laporan keuangan direfleksikan oleh lima (5) dimensi, yaitu Dapat dipahami, Relevan, Handal, dapat dibandingkan dan dimensi Lengkap. variabel ini menunjukkan persepsi responden terkait kualitas pelaporan keuangan di masing-masing desa, apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan apakah pelaporan tersebut mencerminkan akurasi serta akuntabilitas yang baik. Variabel ketiga yaitu goog government direfleksikan oleh sembilan (9) dimensi, yaitu Partisipasi Masyarakat, dimensi Penerapan Hukum, Transparansi, Daya Tanggap, Berorientasi Konsensus, Keadilan, Efektifitas dan efisiensi, Akuntabilitas dan Visi Misi Strategi. Data deskriptif menunjukkan seberapa jauh desa-desa di Denpasar telah menerapkan prinsip-prinsip good governance berdasarkan penilaian responden.

Berdasarkan tabel Descriptive Statistics, terdapat tiga variabel yang dianalisis, yaitu Pemanfaatan Siskeudes, Kualitas Laporan Keuangan, dan Good Governance, dengan jumlah responden sebanyak 172 orang. Variabel Pemanfaatan Siskeudes memiliki nilai rata-rata sebesar 39,360, dengan nilai minimum 30,0 dan maksimum 50,0, serta standar deviasi 3,5323. Hal ini menunjukkan tingkat pemanfaatan Siskeudes yang relatif baik dengan persebaran data yang kecil. Selanjutnya, variabel Kualitas Laporan Keuangan memiliki rata-rata sebesar 38,860, dengan nilai minimum 28,0 dan maksimum 50,0, serta standar deviasi 3,7281, yang juga mengindikasikan kualitas laporan keuangan yang cukup baik dengan variasi data yang rendah. Sementara itu, variabel Good Governance memiliki rata-rata yang lebih tinggi, yaitu 70,099, dengan nilai minimum 51,0 dan maksimum 83,0, serta standar deviasi 5,6813. Hal ini menunjukkan penerapan good governance yang cukup tinggi, meskipun memiliki persebaran data yang lebih besar dibandingkan dua variabel lainnya. Secara keseluruhan, hasil ini menggambarkan bahwa pemanfaatan Siskeudes, kualitas laporan keuangan, dan penerapan good governance dalam penelitian ini berada pada tingkat yang baik, dengan variasi terbesar ditemukan pada penerapan good governance.

Tahap berikutnya adalah menguji Kuesioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian. Uji yang pertama merupakan uji validitas. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka hasil pengujian validitas ditunjukkan dalam Tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Butir Kuisiонер	Koefisien Korelasi	Nilai kritis (r-tabel) $\alpha=5\%$ ; N=172-2	Keterangan
Pemanfaatan Siskeudes (X)	X.1	0,417	0,1497	valid
	X.2	0,456	0,1497	valid
	X.3	0,565	0,1497	valid
	X.4	0,519	0,1497	valid
	X.5	0,589	0,1497	valid
	X.6	0,550	0,1497	valid
	X.7	0,487	0,1497	valid
	X.8	0,612	0,1497	valid
	X.9	0,671	0,1497	valid
	X.10	0,383	0,1497	valid
	Y.1	0,631	0,1497	valid
	Y.2	0,601	0,1497	valid
	Y.3	0,583	0,1497	valid

Variabel	Butir Kuisisioner	Koefisien Korelasi	Nilai kritis (r-tabel) $\alpha=5\%$ ; N=172-2	Keterangan
Good Government (Y)	Y.4	0,548	0,1497	valid
	Y.5	0,391	0,1497	valid
	Y.6	0,541	0,1497	valid
	Y.7	0,539	0,1497	valid
	Y.8	0,584	0,1497	valid
	Y.9	0,619	0,1497	valid
	Y.10	0,562	0,1497	valid
	Y.11	0,54	0,1497	valid
	Y.12	0,416	0,1497	Valid
	Y.13	0,59	0,1497	Valid
Kualitas Laporan Keuangan (M)	Y.14	0,527	0,1497	valid
	Y.15	0,632	0,1497	valid
	Y.16	0,529	0,1497	valid
	Y.17	0,68	0,1497	valid
	Y.18	0,53	0,1497	valid
	M.1	0,547	0,1497	valid
	M.2	0,53	0,1497	valid
	M.3	0,466	0,1497	valid
	M.4	0,459	0,1497	valid
	M.5	0,502	0,1497	valid
M.6	0,407	0,1497	valid	
M.7	0,476	0,1497	valid	
M.8	0,492	0,1497	valid	
M.9	0,553	0,1497	valid	
M.10	0,56	0,1497	valid	

Sumber : Data Primer diolah (2024)

Hasil pengujian validitas yang ditunjukkan pada tabel 1 dapat dijelaskan bahwa seluruh item pernyataan variabel penelitian memiliki nilai rhitung > rtabel, pada taraf signifikansi 95% ( $\alpha=0,05$ ) dan  $n = 172$ , dimana  $r$  tabel = 0,1497. Hal ini bisa disimpulkan bahwa seluruh item variable penelitian valid untuk dijadikan instrumen dalam penelitian atau pernyataan yang diajukan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Uji instrumen yang kedua adalah uji reliabilitas. Tabel 3 merupakan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan perhitungan SPSS 23:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Indikator	Keterangan
Pemanfaatan Siskeudes (X)	0,748	10	Reliabel
Good Government (Y)	0,806	18	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (M)	0,731	10	Reliabel

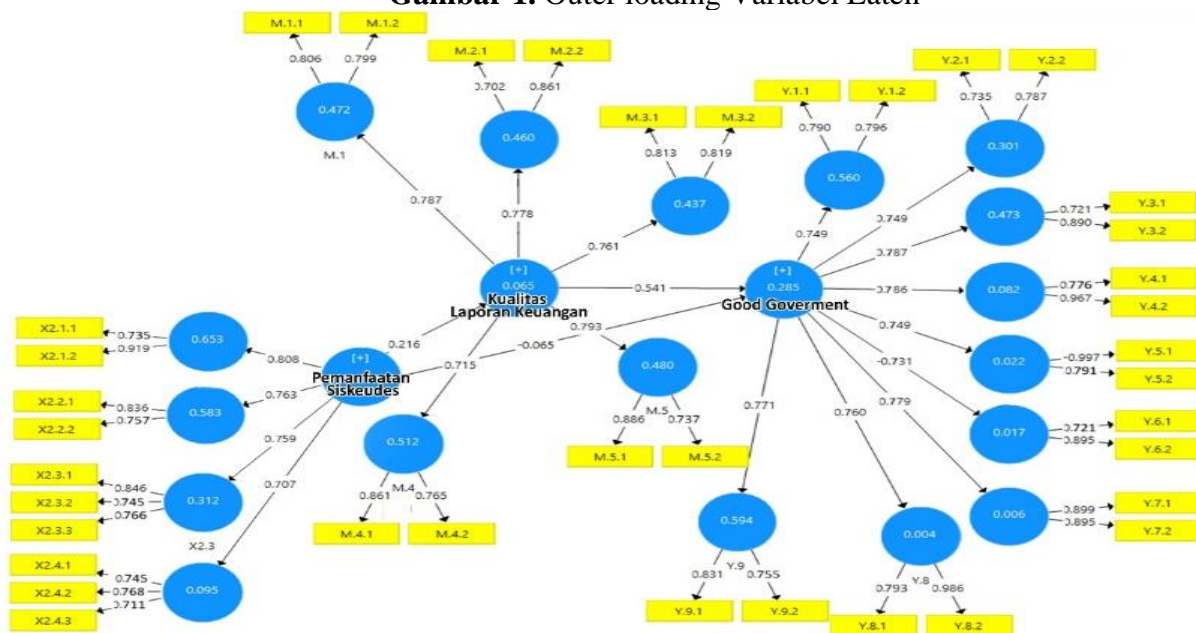
Sumber: Data primer diolah (2024)

Hasil uji reliabilitas pada tabel 2 menunjukkan instrumen dinyatakan valid karena memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,6. Dengan demikian seluruh kuesioner dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. Sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan Outer



loading. Uji outer loading bertujuan untuk mengevaluasi validitas konvergen dan kualitas model pengukuran dalam analisis PLS-SEM. Outer loading mengukur sejauh mana indikator merefleksikan konstruk laten yang diwakilinya, dengan nilai ideal  $\geq 0,7$  untuk menunjukkan hubungan yang kuat. Pengujian ini memastikan relevansi indikator terhadap konstruk, mengidentifikasi indikator lemah untuk dieliminasi, serta meningkatkan validitas dan reliabilitas model. Dengan memastikan konsistensi dan kekuatan hubungan antara indikator dan konstruk, uji outer loading membantu memperkuat keakuratan hasil penelitian. Berikut gambar hasil uji outer loading :

**Gambar 1.** Outer loading Variabel Laten



Dari Hasil analisis dengan mempergunakan SmartPLS Versi 3 diperoleh sebaran loading factor sebagaimana disajikan pada Gambar 1. Ternyata outer- model yang membentuk variabel Pemanfaatan Siskeudes, Kualitas laporan keuangan dan Good Government memenuhi syarat dimana loading factor dari semua indikator yang ada menyebar secara covary yaitu berkisar diatas 0,5- 0,6 sehingga memenuhi syarat uni-dimensional (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017), di mana menghilangkan salah satu dari indikator tidak akan berpengaruh kepada variabel laten lainnya dalam suatu hubungan struktural. Berdasarkan identifikasi diatas tidak terdapat indikator yang dikeluarkan pada sublaten Partisipasi Masyarakat, Penerapan hukum, trnsparansi, daya tanggap, Berorientasi consensus, keadilan, efektivitas/efisiensi, akuntabilitas, dan visi misi strategi. Metode yang dapat dimanfaatkan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian memiliki kualitas yang layak dipercaya, adalah dengan memanfaatkan pendekatan heterotrait-monotrait ratio (Henseler,Ringle, & Sarstedt, 2015). Berdasarkan metode heterotrait-monotrait ratio tersebut, didapatkan hasil perhitungan ternyata masih mengindikasikan bahwa sebagian besar sebaran nilai heterotrait-monotrait adalah tersebar dibawah 0.85, sehingga dapat dinyatakan bahwa konstruk-konstruk yang dibangun penelitian ini bersumber dari pengukuran instrumen yang valid (Henseler,Ringle, & Sarstedt, 2015).

Hasil analisis jalur disajikan pada tabel 3. Selain itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, analisis tersebut juga dilengkapi dengan visualisasi berupa gambar jalur (path diagram). Visualisasi ini dirancang untuk memberikan informasi yang lebih rinci dan mendalam terkait detail nilai statistik t pada setiap indikator yang terlibat dalam analisis

tersebut. Dengan demikian, penyajian data dalam tabel dan gambar jalur ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendukung interpretasi hasil analisis secara keseluruhan.

**Tabel 3.**Tabel Koefisien Jalur

	Original Sample	Sample Mean	Standar Deviasi	T Statistics	P values
Penerapan Siskeudes -> Good Government	-0.065	-0.037	0.135	0.477	0.634
Kualitas Laporan Keuangan -> Good Government	0.541	0.408	0.231	2.339	0.020
Penerapan Siskeudes -> Kualitas Laporan Keuangan -> Good Government	0.405	0.275	0.158	2.569	0.010

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh Hasil pengujian pengaruh langsung dari variabel Penerapan Siskeudes terhadap variabel Good Government diperoleh nilai koefisien jalur sebesar (Ordinal Sampel) 0.065 (negatif), maka peningkatan nilai variabel Penerapan Siskeudes akan diikuti oleh penurunan nilai variabel Good Government sebesar 6.5%. Pengaruh variabel Penerapan Siskeudes terhadap variabel Good Government mempunyai nilai P-Values (0.634) >  $\alpha$  (0.05), sehingga variabel Pemanfaatan Siskeudes tidak dapat mempengaruhi variabel Good Government. Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (Hayati, 2021). Namun, dalam konteks kantor desa di Kota Denpasar, terdapat beberapa kasus di mana pemanfaatan Siskeudes tidak memberikan dampak signifikan terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Governance (GG). Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk kualitas sumber daya manusia, komitmen dari pihak pengelola desa, hingga kebijakan yang tidak mendukung implementasi sistem secara efektif. Siskeudes dirancang untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa, sejalan dengan prinsip-prinsip Good Governance yang mencakup partisipasi, transparansi, responsivitas, dan efektivitas (Hafid, 2021). Namun, dalam beberapa penelitian terbaru, ditemukan bahwa pemanfaatan Siskeudes tidak selalu berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola desa.

Hasil pengujian pengaruh langsung dari variabel Kualitas Laporan keuangan terhadap variabel Good Government diperoleh nilai koefisien jalur (Ordinal Sampel) sebesar 0.541 (positif), maka peningkatan nilai variabel Kualitas Laporan keuangan akan diikuti oleh peningkatan nilai variabel Good Government sebesar 54.1%. Pengaruh variabel Kualitas Laporan Keuangan terhadap variabel Good Government mempunyai nilai P-Values (0.020) <  $\alpha$  (0.05), sehingga variabel Kualitas Laporan keuangan dapat mempengaruhi variabel Good Government. Good Governance mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan efisiensi, yang semuanya memerlukan informasi keuangan yang akurat dan dapat diandalkan (Riani, 2020). Dengan demikian, kualitas pelaporan keuangan yang tinggi dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan mendorong kepercayaan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, beberapa studi terbaru menunjukkan

bahwa kualitas pelaporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi GG di desa-desa, termasuk di Denpasar. Kualitas pelaporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Good Governance di kantor desa se-Kota Denpasar. Laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu dapat mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bahwa pengambilan keputusan di tingkat desa didasarkan pada data yang valid (Ramli, 2021). Meskipun masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti kompetensi SDM dan penggunaan teknologi, potensi untuk memperbaiki tata kelola desa melalui peningkatan kualitas pelaporan keuangan sangat besar. Dengan komitmen yang kuat dari perangkat desa dan dukungan dari pemangku kepentingan, kualitas pelaporan keuangan dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi tercapainya Good Governance di tingkat desa.

Pengaruh tidak langsung Penerapan Siskeudes terhadap Good Government yang di mediasi variabel Kualitas Laporan keuangan mempunyai koefisien jalur (Ordinal Sampel) sebesar 0.405 (positif), maka variabel Kualitas Laporan keuangan dapat memperantarai pengaruh variabel X terhadap variable Good Government sebesar 40.5%. Pengaruh variabel Penerapan Siskeudes terhadap Good Government yang dimediasi variabel Kualitas Laporan keuangan mempunyai nilai P-values ( $0.010 < \alpha (0.05)$ ), sehingga variabel Kualitas Laporan keuangan dapat memediasi pengaruh variabel Penerapan Siskeudes terhadap variabel Good Government. Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah menjadi salah satu upaya utama untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di kantor desa, termasuk di Kota Denpasar. Siskeudes, yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan efisien (Priyanto, 2021). Dengan sistem ini, pencatatan keuangan, pengelolaan anggaran, dan pelaporan dapat dilakukan secara lebih mudah dan terstandarisasi. Selain akurasi, pemanfaatan Siskeudes juga berdampak pada ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ridwan, (2022), salah satu masalah utama dalam pelaporan keuangan di desa adalah keterlambatan penyusunan laporan. Hal ini sering disebabkan oleh proses pencatatan yang lambat dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan. Namun, dengan adanya Siskeudes, proses pelaporan menjadi lebih cepat karena sistem ini memungkinkan perangkat desa untuk mencatat transaksi keuangan secara real-time dan menyusun laporan dengan lebih mudah (Hardiningsih, 2021). Secara keseluruhan, pemanfaatan Siskeudes memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan di kantor desa se-Kota Denpasar. Sistem ini membantu meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, transparansi, dan efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan. Meskipun masih ada tantangan dalam penerapannya, seperti kurangnya pelatihan dan infrastruktur yang memadai, potensi Siskeudes dalam meningkatkan tata kelola keuangan desa sangat besar. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah daerah dan peningkatan kompetensi SDM di desa, Siskeudes dapat menjadi alat yang efektif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan benar-benar mendukung tercapainya Good Governance (Nasution, 2022).

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada seluruh desa di Kota Denpasar, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tidak secara langsung mempengaruhi penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam tata kelola pemerintahan desa. Meskipun Siskeudes telah diimplementasikan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem tersebut belum berhasil memberikan dampak signifikan terhadap prinsip-prinsip utama GCG,

seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Hal ini mengindikasikan bahwa sekadar menggunakan Siskeudes belum cukup untuk mendorong perubahan dalam tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Namun, temuan lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dapat berperan sebagai variabel mediasi yang signifikan dalam hubungan antara Siskeudes dan GCG. Meskipun pemanfaatan Siskeudes tidak berdampak langsung pada GCG, sistem ini mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh desa. Laporan keuangan yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel memiliki peran penting dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip GCG. Dengan demikian, Siskeudes dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap GCG jika disertai dengan peningkatan kualitas pelaporan keuangan desa. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat proses pelaporan keuangan sebagai langkah kunci dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satu keterbatasan utama adalah lingkup lokasi penelitian yang terbatas pada beberapa desa tertentu. Hal ini mengurangi generalisasi hasil penelitian karena setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi budaya, kapasitas sumber daya manusia, maupun kondisi geografis. Selain itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini tidak selalu mencerminkan kondisi terkini, terutama jika terjadi perubahan kebijakan atau pembaruan pada sistem keuangan desa (Siskeudes). Keterbatasan lainnya adalah penggunaan variabel yang terbatas, yakni akurasi dan akuntabilitas pelaporan keuangan, tanpa memasukkan faktor lain seperti transparansi, efisiensi, atau partisipasi masyarakat yang juga relevan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan. Variasi tingkat pemahaman responden terhadap Siskeudes juga menjadi tantangan, sehingga potensi bias dalam pengumpulan data dapat memengaruhi validitas hasil penelitian.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian lanjutan disarankan mencakup wilayah yang lebih luas dengan karakteristik yang beragam, sehingga hasilnya lebih representatif untuk konteks nasional. Selain itu, pengumpulan data primer yang lebih komprehensif, seperti wawancara mendalam atau observasi langsung, dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi secara lebih akurat. Penelitian berikutnya juga perlu memasukkan variabel tambahan, seperti transparansi anggaran dan keterlibatan masyarakat, yang dapat memberikan wawasan lebih luas tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Sebelum pengumpulan data, pelatihan singkat untuk responden mengenai sistem Siskeudes dan pentingnya pelaporan keuangan yang akurat dan akuntabel dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas data. Terakhir, pendekatan studi longitudinal disarankan untuk menganalisis perubahan jangka panjang dalam tata kelola pemerintahan desa setelah penerapan Siskeudes, sehingga dampak sistem tersebut dapat dievaluasi secara lebih menyeluruh. Saran-saran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian dan memberikan kontribusi yang lebih berarti terhadap pengembangan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

### Ucapan Terima Kasih

Kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Warmadewa sebagai penyedia dana penelitian.

### Daftar Pustaka

- Agustin, S. Y., & Wahyuni, D. U. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Mahasiswa Manajemen*, 6(1). <https://doi.org/10.21067/Jrmm.V6i1.4467>
- Dewi, K., & Yadiati, W. (2021). Peran Kualitas Laporan Keuangan dalam Meningkatkan Praktik GCG pada BUMN. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah Publik*, 20(1), 45–60.
- Fitrianti, M., & Sari, V. F. (2024). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan prinsip good governance. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6(1), 206–218. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1114>

- Hafid, M. (2021). Penerapan Siskeudes di Pemerintahan Desa Gunung Batu. *Jurnal Kebijakan*.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Sage Publications.
- Hardiningsih, P., Srimindarti, C., & Kristiana, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang). *Aksar*, 2(1).
- Hardiningsih, P. et al. (2021). Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Haryanto, F., & Suryana, H. (2020). Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 22(2), 115–128.
- Hastutiningtyas, K. N. (2023). Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Gunungsari. *Ecodunamika*, 4(2). <https://ejournal.uksw.edu/ecodunamika/article/view/6462>.
- Hayati, R. (2021). Efektifitas Penerapan Aplikasi Siskeudes di Tabalong. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 5(2).
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135.
- Indrianti, R. et al. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa dengan Siskeudes. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 4(1).
- Juardi, Muhammad Sapril Sardi, Muchlis, Mustakim, Putri, R. A. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 4(1).
- Juardi, M. et al. (2021). Evaluasi Penggunaan Siskeudes di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ekonomi Peradaban*, 4(2).
- Kindangen, R. S., Saerang, D. P. E., & Budiarmo, N. S. (2022). Pengaruh kompetensi, motivasi dan kompensasi terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa berbasis SISKEUDES di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado*, 2(1), 95–105.
- Kuraesin, A., & Yadiati, W. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Di Badan Usaha Milik Negara. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 356–364. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i2.1516>
- Kurniawan, P. S. (2021). Pengaruh Penggunaan Siskeudes terhadap Good Governance. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*.
- Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Akuntabilitas Pemerintahan Desa dengan Siskeudes. *Behavioral Accounting Journal*, 3(1).
- Maryam, M., Sellang, K., & Erfina, E. (2021). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Di Kecamatan Maiwa. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 9(3), 171–180. <https://doi.org/10.55678/jia.v9i3.559>
- Nasution, R. (2022). SISKEUDES dalam Meningkatkan Akurasi Pelaporan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2).
- Norliani, R. et al. (2020). Penerapan Siskeudes di Kecamatan Jaro. *Jurnal STIA Tabalong*, 3(2).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Priyanto, R. (2021). Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas SISKEUDES. *Jurnal Sistem Informasi*, 9(3).

- Ramli, M. (2021). Penerapan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa. *Akuntabilitas*, 12(1).
- Riani, F. et al. (2020). Implementasi Aplikasi Siskeudes di Kutai Timur. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 7(4).
- Ridwan, M. A. (2022). Peran SISKEUDES dalam Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah Publik*, 6(1).
- Runtuuwu, K. V., Tamboto, H., & Kambey, J. (2021). Analisis sistem akuntansi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Studi kasus pada pemerintah Desa Karimbow Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Akuntansi Manado*, 2(2), 168–175. <https://dx.doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1741>
- Susano, A., & Rachmawati, M. (2024). Transparansi dan akuntabilitas keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 50–58. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1382>